

## Analisis Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota Pontianak Terhadap Ekologi Pemerintah

Nadi Rifqi Aufa Rizqullah<sup>1</sup>, Fredericus Caravario<sup>2</sup>, Alidarenja Putra<sup>3</sup>,  
Silvester Razio<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tanjungpura

Email: [naddrzz10@gmail.com](mailto:naddrzz10@gmail.com)<sup>1</sup>, [fredericuscaravarioambo@gmail.com](mailto:fredericuscaravarioambo@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[E1031211087@student.untan.ac.id](mailto:E1031211087@student.untan.ac.id)<sup>3</sup>, [e1031211090@student.untan.ac.id](mailto:e1031211090@student.untan.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah Kota Pontianak terhadap ekologi pemerintahan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Dengan merujuk pada teori ekologi pemerintahan dan kebijakan publik, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa komitmen pemerintah, terutama yang tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020, dan kerja sama dengan pihak swasta (PT Kusuma Jaya Agro) menjadi kekuatan utama dalam kebijakan pengelolaan sampah. Namun, kelemahan terletak pada volume sampah harian yang tinggi, mencapai 400 ton, memerlukan strategi lebih lanjut. Peluang muncul melalui pemanfaatan biomassa dan co-firing sebagai bahan bakar energi terbarukan, sejalan dengan tren global. Ancaman, terutama risiko pencemaran dan keterbatasan anggaran, memerlukan perhatian serius untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah terkait erat dengan kolaborasi pemerintah, pihak swasta, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekologi pemerintahan yang dinamis.

**Kata kunci:** *Pengelolaan Sampah, Ekologi Pemerintahan, Kebijakan Lingkungan.*

### Abstract

This research aims to analyze the impact of the Pontianak City Government's waste management policy on government ecology using a SWOT analysis approach. By referring to ecological theories of government and public policy, this research identifies key factors that influence the implementation of waste management policies. The results of the SWOT analysis show that the government's commitment, especially as reflected in Regional Regulation Number 15 of 2020, and collaboration with the private sector (PT Kusuma Jaya Agro) are the main forces in waste management policy. However, the weakness lies in the high daily waste volume, reaching 400 tons, requiring further strategies. Opportunities arise through the use of biomass and co-firing as renewable energy fuel, in line with global trends. Threats, especially the risk of pollution and budget constraints, require serious attention to maintain environmental sustainability. This research confirms that the success of waste management policies is closely related to collaboration between the government, the private sector and community participation in maintaining a dynamic government ecology.

**Keywords :** *Waste Management, Government Ecology, Environmental Policy.*

### PENDAHULUAN

Kalimantan barat, terutama di pontianak memilik jumlah penduduk sebanyak 676.096 pada tahun 2023 (Irni 2023). Dengan Bertambahnya jumlah penduduk di Ibu Kota ini maka dapat berpengaruh terhadap terjadinya masalah dalam hal pengelolaan sampah yang ada, yaitu meningkatnya konsumsi serta pola hidup masyarakat yang terus menerus menambah

jumlah timbulan dari sampah dan keberagaman karakteristik sampah. Hal ini juga dapat mempengaruhi ekologi didalam pemerintahan dengan adanya penigkatan yang terus terjadi pada jumlah sampah,

Kebijakan dari pemerintah terutama tentang Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan diharapkan bisa menekan peningkatan dari kuota sampah yang terus meningkat, serta juga mendapatkan dampak yang baik terhadap ekologi pemerintahan yang dimana pemerintahan dapat lebih terfokus pada masalah yang lain tanpa harus terkena dampak dari masalah pengelolaan sampah.

Hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah memiliki nama lain yaitu ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan yakni sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan karena dengan memiliki ekologi pemerintahan yang baik, maka ketepatan dan kesuksesan dalam pembuatan kebijakan maupun implementasinya semakin akurat. Menurut (Hasibuan 2019), sistem ekologi terbentuk melalui interaksi timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, di mana subsistem yang saling berinteraksi dalam kerangka organisasi disebut sebagai ekosistem..

Ekologi Pemerintahan adalah bagian dari Ilmu Pemerintahan yang meneliti dampak lingkungan terhadap pemerintahan, baik secara nyata maupun ideal. Oleh karena itu, Ekologi Pemerintahan mempertimbangkan pengaruh lingkungan yang ada pada pemerintahan, sejalan dengan konsep ekologi sebagai studi tentang interaksi saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, pembahasan difokuskan pada dampak kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sampah di kota Pontianak.

Jadi menurut penulis, pada intinya adalah bahwa sistem ekologi muncul karena ada hubungan keterkaitan antara makhluk hidup dan antara lingkungannya, dan ketika subsistem tersebut berinteraksi di dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu, itu membentuk apa yang disebut ekosistem. Ini mencerminkan pandangan bahwa elemen-elemen dalam suatu ekosistem saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain dalam menciptakan suatu keseimbangan dinamis.

Definisi sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 adalah sisa dari kegiatan manusia sehari-hari atau proses alam yang berwujud padat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif menjadi suatu keharusan, terutama di Kota Pontianak yang menghadapi permasalahan signifikan terkait sampah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, diterbitkan pada 23 Oktober 2017, merupakan langkah lanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, khususnya Pasal 6. Perpres ini menetapkan target pengelolaan sampah yang harus dicapai pada tahun 2025, yaitu mencapai 100% pengelolaan sampah dengan metode yang efektif. Dalam mencapai target ini dapat diukur melalui penurunan jumlah sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%, sebagai upaya menuju Indonesia Bersih Sampah. Pentingnya mencapai 100% pada tahun 2025 menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mengelola sampah di Indonesia yang telah mencapai tingkat kepadatan dan jumlah yang signifikan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyatakan bahwa saat ini masyarakat sangat menginginkan lingkungan yang bersih, baik, dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi tersebut. Upaya ini membutuhkan kolaborasi dan dukungan bersama dari berbagai pihak, termasuk 32 kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan masyarakat. Inisiatif secara keseluruhan ini mencerminkan tekad yang kuat untuk menggugah partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui perubahan perilaku dan budaya di Indonesia.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian rencana program, aktivitas, tindakan, keputusan, dan sikap yang diambil oleh berbagai pihak atau aktor sebagai langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi. Selain itu, penetapan kebijakan juga menjadi faktor krusial bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. (Mansur 2021).

Kebijakan publik memiliki beberapa model yang dibentuk dengan tujuan memberikan informasi kepada para pengambil keputusan yang berupaya mengembangkan kebijakan untuk menangani permasalahan yang ada, khususnya dalam konteks situasi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Menurut (Ruiz Estrada 2011), model dalam kebijakan publik dapat diklasifikasikan menjadi 12 kategori yaitu, 1) perdagangan domestik dan internasional; 2) energi, komunikasi, infrastruktur dan kebijakan transportasi; 3) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; 4) pengeluaran fiskal dan pemerintah; 5) kelembagaan, regulasi dan negosiasi; 6) ketenagakerjaan dan kependudukan; 7) moneter, perbankan, dan investasi; 8) produksi dan konsumsi; 9) teknologi serta penelitian dan pengembangan; 10) kesejahteraan dan sosial; 11) pertumbuhan ekonomi dan pembangunan; 12) serta lain-lain.

Masalah pada kajian ini adalah sampah, sampah merupakan sumber penyakit bagi masyarakat jika tidak dibuang atau dimusnahkan, jadi kebijakan dalam pengelolaan sampah sesuai dengan salah satu model kebijakan publik yaitu "pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan". Maka dari itu, diperlukan kebijakan untuk pengelolaan sampah salah satunya ialah daur ulang sampah menjadi energi terbarukan. Ini merupakan salah satu langkah tepat dalam pengelolaan sampah yang bisa berguna untuk masyarakat sehingga terciptanya ekologi pemerintahan yang baik.

Menurut UU-18/2008 dalam (Enri Damanhuri 2010), pengelolaan sampah merupakan tindakan yang terorganisir, menyeluruh, dan berkelanjutan yang melibatkan langkah-langkah pengurangan dan penanganan sampah. Sampah, dalam konteks ini, merujuk pada sisa aktivitas keseharian manusia atau hasil dari proses alam yang memiliki bentuk padat. Dalam kerangka pengelolaan sampah, berbagai jenis sampah diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa kegiatan pengelolaan sampah dilaksanakan secara terstruktur, menyeluruh, dan berkesinambungan, melibatkan serangkaian langkah pengurangan dan penanganan sampah. Dengan kata lain, proses ini direncanakan dan diimplementasikan secara terorganisir, melibatkan berbagai aspek dan tahapan dalam penanganan sampah. Tujuan utama dari kegiatan pengelolaan sampah ini adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan memberikan penanganan yang sesuai terhadap sampah yang ada. Secara singkat, pengelolaan sampah bertujuan mencapai efisiensi dalam penanganan sampah secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga tahapan pengolahan akhir.

Maka dari peraturan dan kebijakan yang dijelaskan di atas, Diketahui bahwa pemerintah itu memiliki dampak tentang pengelolaan sampah terutama tentang aturan dan kebijakannya. Berdasarkan masalah di dalam hal pengelolaan sampah ini, maka penulis ingin menyusun suatu analisis bagaimana dampak dari pengelolaan tersebut kepada ekologi pemerintah kota Pontianak. Sehingga dapat diketahui bagaimana dampaknya kepada suatu ekologi pemerintahan tersebut.

## **METODE**

Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang didasarkan pada suatu filosofi tertentu yang digunakan untuk menyelidiki kondisi ilmiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan dan analisis data dalam metode ini bersifat kualitatif dan lebih menekankan pada pemahaman makna. Sugiyono, seperti yang dikutip oleh (Creswell 2013), menggambarkan penelitian kualitatif sebagai studi yang mendalami kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai materi.

Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan melalui studi literatur, yang merupakan serangkaian kegiatan terkait dengan pengumpulan data dari sumber-sumber yang sudah terdokumentasi. Studi literatur mencakup membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian dengan tujuan menghasilkan penelitian yang terkini (Zed 2008). Dengan demikian, studi literatur menjadi cara untuk mendapatkan informasi dari literatur yang telah ada, memahami, dan mengelola materi penelitian yang telah tersedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kota Pontianak Terhadap Ekologi Pemerintah menggunakan salah satu teori model kebijakan publik menurut (Ruiz Estrada 2011) yaitu “pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan”. Jadi penulis disini akan membahas tentang bagaimana cara pemerintah Kota Pontianak melakukan pengelolaan sampah yang berdampak pada ekologi pemerintahan, seperti peraturan daerah terkait lingkungan.

Rujukan kebijakan yang diambil merujuk pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk periode 2020 – 2050. Pasal 1 nomor 4 dari peraturan ini menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup merupakan usaha yang sistematis dan terpadu dengan tujuan menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan terhadap lingkungan. Aspek-aspek yang tercakup dalam usaha ini melibatkan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diinterpretasikan sebagai serangkaian langkah yang terintegrasi secara sistematis untuk memelihara fungsi dan mencegah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup. Persoalan persampahan menjadi salah satu fokus utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 6. Menurut (Hartono 2008), sampah merupakan materi yang tersisa setelah berakhirnya suatu proses, yang pada dasarnya tidak diinginkan. Selain itu, konsep sampah juga muncul sebagai hasil dari aktivitas manusia.

Pada situs berita *AntaraKalbar* oleh (Andilala 2022), dalam hal ini Pemerintah Kota Pontianak telah menjalin kerja sama dengan PT Kusuma Jaya Agro untuk mengatasi masalah sampah di kota tersebut. Kerja sama swasta ini melibatkan pengolahan sampah dan penggunaan *co-firing* sebagai bahan bakar energi terbarukan. Menurut (Fahmi et al. 2023), *co-firing* adalah tindakan menambahkan biomassa sebagai alternatif sebagian bahan bakar dalam boiler batubara tanpa perlu mengubahnya, dan dapat dilakukan dengan atau tanpa modifikasi. Biomassa memiliki keunggulan tertentu, salah satunya adalah sifatnya yang dapat diperbaharui, menjadikannya sebagai sumber energi yang berkesinambungan. Dalam penjelasannya, Edi menekankan signifikansi manajemen yang efisien dalam pengelolaan sampah, termasuk pertimbangan untuk mengalihkan sampah ke bank sampah atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pemerintah menyediakan fasilitas transportasi untuk mengangkut sampah yang akan diolah oleh pabrik *co-firing*. Kerja sama ini diinisiasi sebagai respons terhadap meningkatnya masalah sampah yang ada di Kota Pontianak, di mana produksi sampah harian mencapai hampir 400 ton.

Tindakan ini merupakan sebuah salah satu tindakan positif dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Dengan produksi sampah harian yang mencapai 400 ton, sebuah jumlah yang tidaklah kecil, kerja sama dengan pihak luar menjadi solusi untuk memastikan kesehatan lingkungan di Kota Pontianak. Kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan dukungan eksternal dalam penanganan sampah telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pemeliharaan kebersihan dan keberlanjutan lingkungan kota.

Dalam konteks ekologi pemerintahan, kolaborasi dengan perusahaan pengelola sampah mencerminkan langkah proaktif dalam mencapai tujuan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Pontianak dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya eksternal untuk mengoptimalkan efisiensi dalam proses pengelolaan sampah, sambil merancang regulasi yang mendukung keberlanjutan. Pihak luar dapat membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan sistem pengelolaan sampah, menciptakan sinergi yang positif antara elemen-elemen ekologi pemerintahan dan praktik-praktik keberlanjutan. Keselarasan ini menggarisbawahi peran vital kerjasama eksternal dalam menciptakan ekologi pemerintahan yang dinamis dan responsif terhadap tantangan lingkungan.

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian studi literatur ini, penulis melakukan analisis SWOT untuk mengetahui dampak daripada kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak terhadap ekologi pemerintahan. SWOT menurut (Kleinstauber, F. 2002), bertujuan untuk menetapkan capaian tujuan usaha yang nyata dan sesuai dengan

kondisi perusahaan atau organisasi ataupun instansi, sehingga diharapkan lebih mudah tercapai.

Analisis SWOT terbagi menjadi empat bagian yang membantu mengenali pertimbangan pada faktor internal maupun eksternal. Kekuatan (*Strengths*) mengacu pada elemen internal di dalam organisasi yang mendukung pencapaian tujuan, sementara kelemahan (*Weaknesses*) merujuk pada faktor internal (dari dalam) yang menghambat kesuksesan organisasi. Di sisi lain, peluang (*Opportunities*) merupakan aspek eksternal yang berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, dan ancaman (*Threats*) merupakan faktor lingkungan eksternal (dari luar) yang dapat menjadi hambatan atau potensi ancaman terhadap pencapaian tujuan (Zainuri and Budi Setiadi 2023).

Berikut analisis SWOT yang telah penulis lakukan:

### **Kekuatan (*Strengths*)**

#### 1. Komitmen Pemerintah Kota Pontianak

Komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan pengelanaan sampah mencerminkan kekuatan, menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah lingkungan, salah satu contoh keseriusannya adalah dengan pembuatan (Perda) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2050

#### 2. Bekerja Sama Dengan Pihak Swasta Untuk Menangani Permasalahan Dalam Pengelolaan Sampah

Dengan adanya kerja sama antara perusahaan swasta (PT Kusuma Jaya Agro) dalam pengolahan sampah dan *co-firing* memberikan solusi alternatif untuk mengelola sampah dan memanfaatkannya sebagai sumber energi terbarukan.

### **Kelemahaan (*Weaknesses*)**

#### Volume Sampah Harian Yang Tinggi

Meskipun sudah bekerjasama dengan pihak swasta, masih terdapat kelemahan dalam mengatasi volume sampah harian yang tinggi yaitu 400 ton, angka tersebut bukanlah angka yang kecil untuk mengatasi sampah.

### **Peluang (*Opportunities*)**

#### 1. Pemanfaatan Biomassa dan *Co-firing*

Peluang terbuka dengan pemanfaatan biomassa dan *co-firing* sebagai bahan bakar energi terbarukan, sesuai dengan tren global untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil sekaligus mengurangi permasalahan sampah yang ada di Kota Pontianak.

#### 2. Kolaborasi Eksternal

Bekerja sama dengan pihak eksternal atau swasta dapat merancang solusi inovatif dalam pengelolaan sampah.

### **Ancaman (*Threats*)**

#### 1. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak optimal, mengingat volume harian sampah yang mencapai 400 ton.

#### 2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran dan sumber daya dapat menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah, memerlukan strategi untuk mengatasi hambatan finansial.

Jadi, hasil daripada analisis SWOT tersebut, menegaskan bahwa dampak dari kebijakan lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terhadap ekologi pemerintahan mencakup peran penting komitmen pemerintah, kolaborasi eksternal, tantangan pengelolaan sampah, peluang energi terbarukan, dan risiko pencemaran lingkungan. Pengelolaan yang bijak akan memastikan harmoni antara pembangunan kota dan keberlanjutan lingkungan di Kota Pontianak.

## SIMPULAN

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pontianak, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020. Analisis kebijakan berfokus pada pengelolaan alam dan penanganan permasalahan lingkungan.

Melalui kerja sama dengan pihak swasta, menunjukkan langkah proaktif dalam mencari solusi. Namun, tantangannya pada volume sampah harian yang tinggi. Peluang pemanfaatan energi terbarukan dengan biomassa dan *co-firing* sesuai dengan tren global. Ancaman terkait pencemaran dan keterbatasan anggaran menjadi fokus utama.

Analisis SWOT menunjukkan kebijakan bergerak ke arah positif. Pentingnya manajemen yang baik dan keselarasan elemen ekologi pemerintahan serta praktik keberlanjutan diharapkan dapat membawa dampak positif dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andilala. 2022. "Pemkot Pontianak Ubah Sampah Jadi Bahan Bakar Energi Baru Terbarukan." *Antarakalbar*. 2022. <https://kalbar.antaraneews.com/berita/511733/pemkot-pontianak-ubah-sampah-jadi-bahan-bakar-energi-baru-terbarukan>.
- Creswell. 2013. "Bagaimana Simbol Komunikasi Pada Kelompok Touring?" *Studi Interaksi Simbolik Pada Anggota Komunitas Fast Rider Di Bandung*, 71–92.
- Enri Damanhuri, Tri Padi. 2010. "Pengelolaan Sampah." *Journal Teknik Lingkungan* 3 (2): 7.
- Fahmi, Muhammad Ainul, Sunarko, Yonanda Cahya, and Zidny Ilma Hasan. 2023. "Analisis Penerimaan Implementasi Co-Firing Di PLN Group Dengan Pendekatan Modified TAM 3 (Modified Technology Acceptance Model 3)." *Jurnal Multidisiplin West Science* 2 (06): 401–21. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i6.390>.
- Hartono, Rudi. 2008. *Penanganan Dan Pengolahan Sampah*. Bogor: Penebar Swadaya.
- Hasibuan, Afriadi Sjahbana. 2019. "Peranan Ekologi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 33–47. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.916>.
- Irni. 2023. "Penduduk Kota Pontianak Semester I Tahun 2023 Berjumlah 676.096 Jiwa." 2023. <https://disdukcapil.pontianak.go.id/penduduk-kota-pontianak-semester-i-tahun-2023-berjumlah-676096-jiwa>.
- Kleinstauber, F., Sutowo Siswanto. 2002. *Strategi Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Mansur, Jumria. 2021. "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6 (2): 324. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>.
- Ruiz Estrada, Mario Arturo. 2011. "Policy Modeling: Definition, Classification and Evaluation." *Journal of Policy Modeling* 33 (4): 523–36. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2011.02.003>.
- Zainuri, Rachmad, and Pompong Budi Setiadi. 2023. "Tinjauan Literatur Sistematis: Analisis Swot Dalam Manajemen Keuangan Perusahaan." *Jurnal Maneksi* 12 (1): 22–28. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i1.1364>.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.